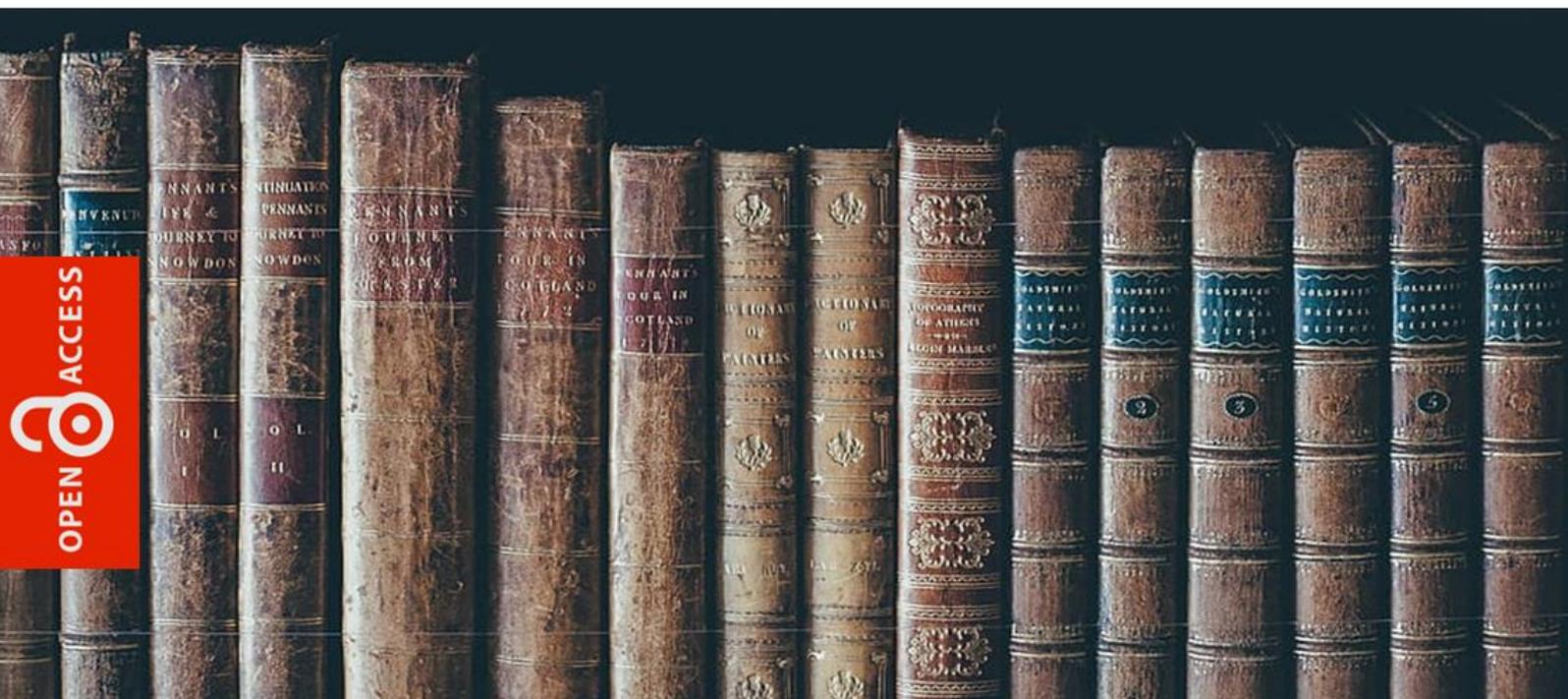




*Volume 4, Issue 1, Januari 2022*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



**OPEN ACCESS**

# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

*Volume 4, Issue 1, Juli 2022*

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta** © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Volume 4, Issue 1, Juli 2022*

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Demianus Korwa	Wewenang Kankain Karkara Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat	1-10
Jane Shirley Wambrauw	Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	11-20
Kalvin Koyomi Rumbewas	Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	21-29

### TINJAUAN LITERATUR

Johanes O. Amboki	Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	30-39
Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira	Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	40-53

### RESENSI BUKU

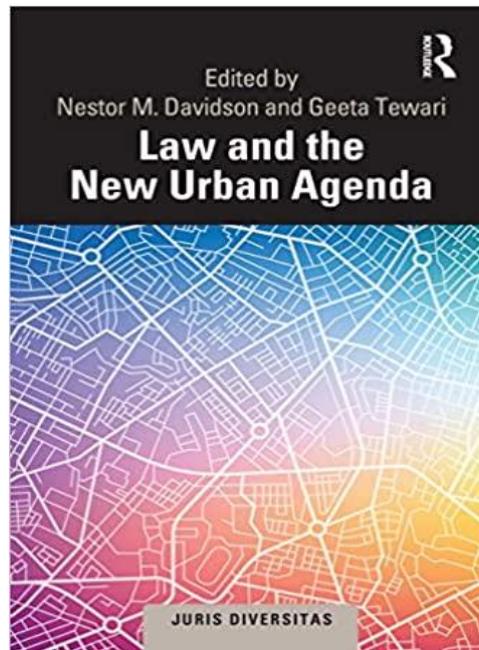
Tegar Danton Suhada	Editors: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari, Law and The New Urban Agenda, 2021 ISBN: 978-103-22363-7-7	54-56
---------------------	--	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.163



Judul Buku	: Law and The New Urban Agenda
Editor	: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari
Tahun Terbit	: 2021
Halaman	: 226
Penerbit	: Routledge
ISBN	: 978-103-22363-7-7
Peninjau Buku	: Tegar Danton Suhada
Afiliasi	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email	: <a href="mailto:tegardanton@gmail.com">tegardanton@gmail.com</a>

## Book Review

Nestor M. Davidson adalah Direktur Fakultas Fordham Urban Law Center. Profesor Davidson telah menerbitkan berbagai karya di bidang hukum perencanaan wilayah dan perkotaan, hukum pemerintah, hukum properti, dan kebijakan hukum tentang perumahan yang terjangkau. Profesor Davidson berpraktik di biro hukum Latham and Watkins dan menjabat sebagai Wakil Penasihat Umum di Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Amerika Serikat. Selain itu, Geeta Tewari adalah Direktur Pusat Hukum Perkotaan Fordham. Tewari telah berpraktek di Departemen Hukum Kota New York dan Kantor Kejaksaan Agung Washington D.C., dan juga memegang gelar *Master of Fine Arts in Writing* dari Columbia University. Karya sastranya telah muncul di majalah *Granta*, *New England Review*, dan publikasi lainnya. Dia adalah anggota Komite Pemajuan Status Wanita *New York Women's Bar Association* dan memimpin gerakan *Women in Urban Law Leadership Initiative* dari Pusat Hukum Perkotaan.

*The New Urban Agenda* (NUA), yang diadopsi pada tahun 2016 saat Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat

III) di Quito, Ekuador, mewakili pemahaman bersama secara global tentang hubungan penting antara urbanisasi dan masa depan yang berkelanjutan.<sup>1</sup> Inti dari visi baru ini yakni mengatasi segudang persoalan hukum dan peluang yang harus dihadapi dunia untuk memenuhi janji agenda tersebut. Sebagai tanggapan yang melengkapi dan memperluas volume editor sebelumnya tentang hukum perencanaan wilayah dan perkotaan, dalam seri ini akan menawarkan evaluasi konstruktif dan kritis terhadap dimensi hukum perencanaan wilayah dan kota. Seperti yang dijelaskan oleh penulis pada volume ini, mulai dari bencana alam dan yang menyebabkan migrasi perkotaan di wilayah Honshu dan Tacloban, hingga tata kelola kolaboratif yang inovatif di Barcelona dan Turin, hingga aksesibilitas ruang publik untuk pekerja tak resmi di New Delhi dan Accra, dan skala kekuatan di antara wilayah metropolitan Brasil, ada urgensi mendalam untuk penelitian yang mendalam dalam memahami bagaimana hukum dapat dimanfaatkan untuk memajukan misi global NUA tentang urbanisme berkelanjutan. Dengan demikian menciptakan dialog provokatif dan akademis tentang efek hukum dari perencanaan NUA, yang akan menarik bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dengan studi wilayah perkotaan.

Buku ini menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris yang terdiri dari dua bagian dimana bagian pertama mencakup 6 bab dan bagian kedua juga mencakup 6 bab. Buku ini diawali dengan pendahuluan mengenai latar belakang penulisan buku oleh Nestor M. Davidson and Geeta Tewari dan kata pengantar oleh Robert Lewis-Lettington and Anne Klen-Amin. Selanjutnya di bagian pertama bertajuk "*The New Urban Agenda in the institutions and structures of urban law*" yang membahas perencanaan penataan kota dalam kelembagaan dan struktur hukum perencanaan wilayah dan kota. Di bagian pertama terdiri dari 6 bab. Di bab pertama membahas tentang Perencanaan penataan kota, kebijakan nasional yang efektif, dan perundang-undangan "*The New Urban Agenda, effective national policies, and legislation*" yang dikarang oleh Maria Mousmouti. Bab kedua membahas tentang pendanaan dalam perencanaan penataan kota "*Financing the New Urban Agenda*" yang dikarang oleh Matthew D. Glasser. Di Bab tiga, Lilian Regina Gabriel Moreira Pires memfokuskan pembahasan terhadap perencanaan penataan kota, tantangan metropolitan, dan otonomi kota dalam hal ini yang terjadi di negara Brasil "*The New Urban Agenda, metropolitan challenges, and municipal autonomy in Brazil*." Di bab empat, dalam persepektif *multi-stakeholder*, Christian Iaione and Elena De Nictolis mengkaji Peran hukum dalam kaitannya dengan perencanaan penataan kota dan perencanaan penataan kota khususnya di wilayah Eropa "*The role of law in relation to the New Urban Agenda and the European Urban Agenda—a multi-stakeholder perspective*." Di bab lima, Francisco Velasco and Carmen Navarro memberikan contoh mengenai perencanaan penataan kota dan partisipasi warga lokal yang dilakukan di Spanyol "*The New Urban Agenda and local citizen participation: the Spanish example*." Pada bab akhir bagian pertama, Beatriz Botero Arcila mengakhiri pembahasan dengan mengulas secara khusus tentang Kota, data, dan perencanaan penataan kota "*Cities, data, and the New Urban Agenda*."

Di bagian ke dua buku ini, mengambil tajuk bentuk perkotaan dan inklusi hubungan hukum dan perencanaan penataan kota "*Urban form and inclusion at the nexus of law and the New Urban Agenda*." Bagian ini diawali dengan ulasan dari Anne Klen-Amin and Rashid Abubakar tentang Hak Asasi Manusia dalam perencanaan penataan kota sebagai upaya dalam mewujudkan kota yang inklusif "*Human rights in the New Urban Agenda: towards inclusive urban planning*." Di bab delapan, Marta Lora-Tamayo Vallvé merumuskan pemikiran dasar tentang Apakah perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan memberikan kerangka hukum yang stabil terkait hak milik dan

---

<sup>1</sup> Johan Silas, "New Urban Agenda And The Island Based Settlements Development," *Journal of Architecture & Environment* 15, no. 2 (2016): 101–8, <https://iptek.its.ac.id/index.php/joae/article/view/2148/2341>.

hukum penggunaan lahan “*Does the New Urban Agenda provide a stable legal framework for property rights and land use law?*” Di bab Sembilan, Marius Pieterse mengulas persoalan yang terjadi di Afrika Selatan tentang internalisasi hukum hak atas perumahan yang layak di Afrika Selatan “*Shifting paradigms from between the lines? Legal internalizations of the right to adequate housing in South Africa.*” Di bab 10, Marlese Von Broembsen menguraikan gagasannya terkait inklusi sosial dan kebijakan perencanaan penataan kota menanggapi persoalan pedagang kaki lima dan ruang publik “*Social inclusion and the New Urban Agenda: street vendors and public space.*” Di bab sebelas, Chien-Yu Liu mengkaji kebijakan perencanaan tempat tinggal pascabencana untuk perencanaan penataan kota “*Lessons from post-disaster shelter policy for the New Urban Agenda.*” Di bab akhir bagian dua, Andrés Boix-Palop mengakhiri bahasan dengan diskusi terkait persoalan regulasi mobilitas perkotaan dan kebijakan perencanaan penataan kota “*The challenges of urban mobility regulation and the New Urban Agenda.*”

Secara garis besar, edisi buku ini memberikan terobosan tentang peran penting hukum, dan reformasi hukum dalam mewujudkan janji dalam kebijakan perencanaan penataan kota. Buku ini memberikan informasi berbagai tantangan yang dihadapi suatu kota dan para pemangku kebijakan saat berusaha untuk melibatkan partisipasi warga yang lebih kuat, melindungi hak asasi manusia, berkembang secara berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan migrasi perkotaan, dan kesiapan menghadapi perubahan iklim dan ancaman lain terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat. Keterlibatan berbagai penulis dari berbagai daerah yang mereka wakili adalah keunggulan dari edisi buku ini dan menjadikannya pijakan awal yang sangat diperlukan dalam mempertimbangkan dimensi hukum guna melaksanakan kebijakan perencanaan penataan kota yang kondusif.

Hukum dan Kebijakan Perencanaan Perkotaan menggarisbawahi nilai hukum perencanaan wilayah dan perkotaan sebagai disiplin ilmu dalam mendukung pembangunan kota inklusif yang sehat bagi semua.<sup>2</sup> Buku ini terbit di waktu yang tepat yang menyoroti banyak tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh pertumbuhan perkotaan bagi sistem hukum di seluruh dunia dan buku ini begitu tepat dengan menghadirkan kelompok cendekiawan eklektik atas keterlibatan mereka dalam kebijakan perencanaan penataan kota.

## REFERENCES

- Mandelker, Daniel R. “The Role of Law In The Planning Process: Law And Contemporary Problems,” 1965.
- Silas, Johan. “New Urban Agenda And The Island Based Settlements Development.” *Journal of Architecture & Environment* 15, no. 2 (2016): 101–8.  
<https://iptek.its.ac.id/index.php/joae/article/view/2148/2341>.

---

<sup>2</sup> Daniel R. Mandelker, “The Role of Law In The Planning Process: Law And Contemporary Problems,” 1965.